

**Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi
Kasus pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah)**

Sartje Wospakrik, Natalia Paranoan, Yoel Pasae
Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia
Email : sartjewospakrik280711@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang akuntabilitas, keterbatasan sumber daya, serta ketidakefektifan pengawasan masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAKIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dan dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah telah meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, transparansi laporan kinerja, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, adanya audit berkala dan pelatihan pegawai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Namun, masih ditemukan kendala dalam hal optimalisasi teknologi informasi serta konsistensi penerapan standar akuntabilitas di berbagai unit kerja. Kesimpulannya, penerapan SAKIP berperan signifikan dalam mewujudkan *good governance*. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan optimalisasi sistem teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci : penerapan; sakipd; *good governance*.

ABSTRACT

The implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is a crucial aspect in realizing good governance. The Inspectorate of Central Papua Province has a strategic role in supervising and evaluating the performance of local government agencies. However, challenges such as lack of understanding of accountability, limited resources, and ineffective supervision are still major obstacles. This study aims to analyze the implementation of SAKIP in the Inspectorate of Central Papua Province and its impact on transparency, accountability, and public trust in local government. The research method used is a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively with data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of SAKIP in the Inspectorate of Central Papua Province has increased the effectiveness of budget

management, transparency of performance reports, and community involvement in supervision. In addition, periodic audits and employee training contribute to improving the quality of public services. However, obstacles are still found in terms of optimizing information technology and the consistency of the application of accountability standards in various work units. In conclusion, the implementation of SAKIP plays a significant role in realizing good governance. To increase its effectiveness, it is necessary to optimize the technology system, increase human resource capacity, and strengthen supervision and evaluation on an ongoing basis.

Keywords: *implementation; regional performance accountability system (sakup); and good governance.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu sistem yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah (Sukarno et al., 2020). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfokus pada pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di instansi pemerintah (Pangumbalerang & Pinatik, 2014). Inspektorat memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penilaian kinerja keuangan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Haryani, 2019).

Penelitian terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diteliti oleh (Mukaromah & Priyono, 2021), meneliti tentang Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakup) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No. 2 2023. P-ISSN: 1412 – 9736. Berdasarkan temuan studi tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan secara lengkap, konsisten, dan sukses di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis setiap tahunnya. Namun upaya berkelanjutan Diskominfo Kabupaten Ciamis masih belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, peningkatan standar sumber daya manusia yang dapat menunjang kinerja Diskominfo Kabupaten Ciamis juga perlu ditingkatkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja (Arofah & Basyar, 2024). Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa kinerja adalah hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Maringka, 2024). Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih. (Njatrijani et al., 2019) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan wujud nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara.

Penelitian ini menetapkan obyek penelitian di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dengan fokus penelitian pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perwujudan *Good Governance*. Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki peran penting dalam pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan instansi pemerintah lainnya. Namun, tantangan dalam pengelolaan keuangan sering kali dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang akuntabilitas kinerja, dan tantangan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dapat berkontribusi dalam mewujudkan *Good Governance* di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Good Governance* pada dasarnya merupakan suatu konsep pencapaian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai suatu konsensus bersama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (Edowai et al., 2021). berdasarkan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada obyek penelitian ini di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, peneliti memperoleh informasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan fenomena penelitian ini, diantaranya:

- a. Tingginya Kebutuhan Pengawasan, dengan meningkatnya alokasi anggaran daerah, kebutuhan akan pengawasan yang efektif menjadi semakin penting. Inspektorat Provinsi Papua Tengah harus memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- b. Ketidakpuasan Terhadap Kinerja Keuangan, masyarakat sering kali mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program-program pemerintah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan realisasi kinerja keuangan yang ada.
- c. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di berbagai instansi pemerintah mungkin tidak konsisten. Beberapa unit mungkin telah berhasil

menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik, sementara yang lain masih mengalami kesulitan. Fenomena ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, masih ada tantangan dalam hal infrastruktur dan keterampilan sumber daya manusia yang perlu diatasi.
- e. Kebijakan terkait pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di daerah. Fenomena ini menciptakan dinamika yang perlu dipahami untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
- f. Keterlibatan pegawai dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem ini. Namun, tantangan dalam hal pemahaman dan partisipasi pegawai dalam pengelolaan kinerja sering kali muncul.
- g. Meskipun evaluasi kinerja dilakukan, hasilnya sering kali tidak digunakan secara maksimal untuk perbaikan. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih baik dalam mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Hasil observasi peneliti pada obyek penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah membawa banyak manfaat bagi pemerintah, namun permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten dimana pemahaman yang rendah mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada publik dan pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kinerja keuangan (Paemba et al., 2024). Selanjutnya hasil observasi tersebut diidentifikasi sebagai suatu fenomena penelitian, fenomena tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dapat berperan dalam mewujudkan *Good Governance*. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam pelatihan, sosialisasi, dan dukungan dari berbagai pihak agar implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAKIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan *good governance*, mengevaluasi dampak penerapan SAKIP terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam penerapan SAKIP agar lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan wawasan mengenai efektivitas penerapan SAKIP serta rekomendasi untuk meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam mengawasi kinerja pemerintah, sehingga dapat berkontribusi dalam membangun tata kelola yang lebih baik. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian terkait akuntabilitas pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah, sementara bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berbasis data dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang signifikan, di antaranya penguatan sistem akuntabilitas dengan mendorong penerapan SAKIP yang lebih efektif melalui standar yang lebih jelas dan sistem pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan pegawai dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja. Optimalisasi teknologi informasi juga menjadi implikasi penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, khususnya dalam pelaporan dan evaluasi kinerja. Terakhir, dengan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Dengan demikian, penerapan SAKIP di Inspektorat Provinsi Papua Tengah dapat semakin efektif dalam mewujudkan *good governance* serta menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian ini di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara dokumentasi. Penelitian ini menetapkan 10 (sepuluh) orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif, mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Good Governance* di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Inspektorat Provinsi Papua Tengah merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Melalui berbagai inisiatif dan praktik, sistem ini berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan.

Berikut adalah mengenai elemen-elemen penting dari Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Good Governance* di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja yang Jelas dan Terukur

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang relevan digunakan untuk menilai keberhasilan program-program yang dijalankan. Dengan adanya parameter yang spesifik, instansi dapat dengan mudah mengevaluasi pencapaian dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

b. Audit Berkala

Inspektorat melakukan audit berkala untuk menilai efektivitas kinerja instansi pemerintah. Audit ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Hasil audit yang transparan membantu instansi dalam mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan strategi perbaikan.

c. Laporan Kinerja yang Transparan

Adanya laporan kinerja yang dipublikasikan secara transparan kepada publik sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat memantau kinerja instansi dan memberikan masukan yang diperlukan, sehingga menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi.

d. Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan kinerja instansi adalah aspek kunci dalam sistem akuntabilitas. Dengan melibatkan masyarakat, instansi pemerintah dapat memperoleh perspektif yang lebih luas, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab publik terhadap kinerja pemerintahan.

e. Indikator Kinerja yang Relevan

Penggunaan indikator kinerja yang relevan merupakan fondasi dari sistem akuntabilitas yang efektif. Indikator ini membantu dalam menilai keberhasilan program dan memberikan gambaran yang jelas tentang dampak kebijakan yang diimplementasikan.

f. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai

Pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai dalam memahami akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu di dalam instansi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Dengan pegawai yang terlatih, kualitas kinerja instansi dapat meningkat secara signifikan.

g. Sistem Pelaporan yang Dapat Diakses

Penerapan sistem pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat memungkinkan publik untuk mendapatkan informasi tentang kinerja instansi dengan mudah. Ini berkontribusi pada transparansi dan membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.

h. Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Kolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan akuntabilitas adalah langkah yang strategis. Dengan berbagi sumber daya dan informasi, instansi dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, serta mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan.

i. Pengawasan Ketat terhadap Pengelolaan Anggaran

Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran daerah sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Dengan sistem akuntabilitas yang baik, instansi dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

j. Penerapan Sanksi bagi Pegawai

Penerapan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan merupakan langkah yang penting untuk mendorong budaya akuntabilitas. Sanksi ini memberikan dorongan bagi pegawai untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Inspektorat Provinsi Papua Tengah mencerminkan komitmen untuk mewujudkan *good governance* yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pengukuran kinerja yang jelas, audit berkala, partisipasi masyarakat, dan berbagai langkah strategis lainnya, inspektorat berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Jaya & Tandi, 2024). Implementasi yang konsisten dari sistem ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab di Provinsi Papua Tengah.

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Tingkat akuntabilitas kinerja di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan *good governance* (Sejati, 2019). Berbagai indikator dan praktik yang diterapkan telah berkontribusi pada peningkatan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Salah satu indikator utama akuntabilitas kinerja adalah transparansi dalam laporan. Peningkatan transparansi laporan di Inspektorat memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan mengenai kinerja instansi. Hal ini tidak hanya memberikan kejelasan tentang penggunaan anggaran dan pencapaian program, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat semakin terlibat dalam pengawasan kinerja instansi, yang menunjukkan adanya kesadaran dan partisipasi yang lebih besar. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses monitoring, instansi dapat memperoleh masukan yang berharga dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil kinerja, sehingga mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi. Terdapat penurunan angka penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah, yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yang diterapkan berhasil mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar telah berkontribusi pada perbaikan ini. Pegawai menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab kinerja mereka. Pelatihan dan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Inspektorat telah meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya akuntabilitas, sehingga mendorong mereka untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab. Audit eksternal yang menunjukkan hasil positif terhadap kinerja instansi mengindikasikan bahwa Inspektorat telah berhasil dalam menerapkan sistem akuntabilitas dengan baik. Hasil audit ini juga berfungsi sebagai pengakuan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Asiawati et al., 2024).

Adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah merupakan dampak positif dari upaya akuntabilitas yang diterapkan. Ketika masyarakat merasa bahwa instansi pemerintah transparan dan akuntabel, mereka cenderung lebih percaya dan mendukung kebijakan yang diambil. Penggunaan sistem pelaporan yang lebih efisien dan transparan telah mempermudah proses pengumpulan dan penyampaian informasi. Sistem ini mendukung instansi dalam mengelola data kinerja dengan lebih baik dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses laporan dengan mudah.

Penilaian kinerja pegawai yang dilakukan secara objektif, berdasarkan indikator yang ditetapkan, memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi dan pengembangan pegawai (Yuningsih, 2018). Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka. Tindak lanjut yang baik terhadap rekomendasi audit menunjukkan komitmen Inspektorat dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Proses ini tidak hanya membantu mengatasi kelemahan yang ada,

tetapi juga memperkuat sistem pengawasan internal. Inspektorat mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam kinerja, yang merupakan langkah penting dalam proses akuntabilitas. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, instansi dapat merespons masalah dengan cepat dan efektif.

Tingkat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menunjukkan perkembangan yang positif dalam upaya mewujudkan *good governance* (Syahrani et al., 2023). Peningkatan transparansi, keterlibatan masyarakat, penurunan penyimpangan anggaran, dan hasil audit yang baik semua berkontribusi pada kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap pemerintah daerah. Dengan terus melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah ini, diharapkan Inspektorat dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat mewujudkan *Good Governance* di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Sistem Akuntabilitas Kinerja di Inspektorat Provinsi Papua Tengah berperan penting dalam mewujudkan *good governance* dengan berbagai cara yang saling berkaitan. Berikut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat mewujudkan *Good Governance* di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:

- a. Dasar yang Jelas untuk Penilaian Kinerja Instansi. Sistem akuntabilitas kinerja menyediakan indikator dan parameter yang jelas untuk mengevaluasi kinerja instansi. Dengan adanya dasar yang terukur, instansi dapat menilai pencapaian dan efektivitas program yang dijalankan, sehingga memudahkan dalam mendiagnosis kekuatan dan kelemahan.
- b. Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya adalah salah satu hasil utama dari penerapan sistem ini. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran, yang membantu mengurangi kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Umpan Balik.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja instansi menciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Dengan melibatkan masyarakat, instansi dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai kinerja mereka, serta meningkatkan akuntabilitas melalui pengawasan publik.
- e. Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Fakta. Sistem akuntabilitas kinerja memfasilitasi pengambilan keputusan yang berbasis data dan fakta. Dengan informasi yang akurat dan relevan, pimpinan instansi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas program dan kebijakan.
- f. Pengurangan Potensi Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang. Dengan adanya pengawasan dan transparansi yang lebih baik, potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Sistem akuntabilitas yang ketat membuat tindakan yang tidak etis lebih sulit untuk dilakukan, sehingga mendukung integritas pemerintahan.
- g. Insentif untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai. Penerapan sistem akuntabilitas juga mencakup pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi. Dengan adanya penghargaan dan pengakuan atas kinerja yang baik, pegawai akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka, menciptakan budaya kerja yang positif.
- h. Peningkatan Kepercayaan Publik. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

Masyarakat merasa lebih yakin bahwa pemerintah bertindak untuk kepentingan mereka, yang penting dalam membangun hubungan baik antara pemerintah dan warga.

- i. Laporan yang Relevan dan mudah dipahami. Penyusunan laporan yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat memungkinkan publik untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tanpa kesulitan. Ini juga membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kinerja instansi.
- j. Kolaborasi Antar Instansi. Sistem akuntabilitas mendorong kolaborasi antar instansi dalam mencapai target kinerja. Dengan bekerja sama, instansi dapat saling mendukung dan berbagi informasi, yang memperkuat upaya kolektif untuk meningkatkan pelayanan publik.
- k. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Ketentuan. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dan penilaian kinerja yang baik, pegawai diharapkan lebih patuh dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan regulasi yang ada.

Sistem Akuntabilitas Kinerja di Inspektorat Provinsi Papua Tengah memiliki dampak yang signifikan dalam mewujudkan *good governance* (Ayub et al., 2018). Dengan menyediakan dasar yang jelas untuk penilaian kinerja, meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi masyarakat, dan berbagai langkah strategis lainnya, sistem ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi yang konsisten dan berkelanjutan dari sistem ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan efektivitas instansi pemerintah di masa mendatang.

KESIMPULAN

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menunjukkan dedikasi yang kuat untuk mewujudkan *good governance* yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan *Good Governance*, sebagai berikut: Pengukuran Kinerja yang Jelas dan Terukur, Audit Berkala, Laporan Kinerja yang Transparan, Partisipasi Masyarakat, Indikator Kinerja yang Relevan, Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai, Sistem Pelaporan yang Dapat Diakses, Kolaborasi dengan Lembaga Lain, Pengawasan Ketat terhadap Pengelolaan Anggaran dan Penerapan Sanksi bagi Pegawai yang tidak memenuhi standar kinerja.
2. Tingkat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menunjukkan perkembangan yang positif dalam mewujudkan *good governance*. Peningkatan transparansi, keterlibatan masyarakat, penurunan penyimpangan anggaran, dan hasil audit yang baik telah berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja di Inspektorat Provinsi Papua Tengah memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan *good governance*. Dengan dasar yang jelas untuk penilaian kinerja, peningkatan transparansi, dan dorongan partisipasi masyarakat, sistem ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi yang konsisten dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan efektivitas instansi pemerintah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arofah, Z., & Basyar, M. R. (2024). Penggunaan SAKIP Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kecamatan Genteng. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 106–115.
- Asiawati, I., Yulita, A. A., & Nopiana, R. B. (2024). Literatur Review: Pengaruh Etika Profesi Akuntan Terhadap Profesionalisme Akuntan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 99–112.
- Ayub, R. D., Utama, M. S., & Wardana, I. G. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(4), 987–1022.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Pusaka Almaida*.
- Haryani, D. S. (2019). Evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Biro Hukum Pemprov Kepri. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 8(1), 19.
- Jaya, A., & Tandi, A. (2024). *International Journal of Engineering Business Analysis of The Influence of Compensation and Career Path on The Performance of The Health Insurance Agents of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia*. 2(04), 1278–1283.
- Maringka, M. (2024). Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Pada Dinas Pariwisata Kota Manado: Evaluation Of The Implementation Of The Performance Accountability System For Government Agencies Based On Presidential Regulation Number 29 of 2014 At Department of Tourism in Manado City. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 8(3), 348–357.
- Mukaromah, R., & Priyono, N. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 3(1), 89–99.
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242–267.
- Paemba, C. L., Todingbua, M. A., & Tandi, A. (2024). *ANALISIS TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN MAMASA Program Studi Manajemen , Program Pascasarjana , Universitas Kristen Indonesia ANALYSIS OF FOLLOW-UP ON THE RESULTS OF THE BPK RI AUDIT OF THE*. 1(3).
- Pangumbalerang, A., & Pinatik, S. (2014). Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
- Sejati, B. (2019). Implementation of Local Agency Performance Accountability System Policy in Realizing Good Governance in Papua: An Influencing Factors. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 147–160.
- Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 110–117.
- Syahrani, N. A., Shaleh, M., & Razak, R. (2023). Pengaruh kompetensi, independensi, dan time budget pressure terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 13–26.

Yuningsih, N. (2018). Penerapan Manajemen Kinerja Pegawai Di Instansi Pemerintah. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 19(2), 141–154.